

RINGKASAN

Prosedur *Digital Payment* (Digipay) Pada Satuan Kerja Lingkup Vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Aldira Grafit Lograhita Pythagoras, NIM D42221072, tahun 2025, 101 hlm., Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Danny Kusuma Atmaja (Pembimbing Praktisi) dan Sugeng Hartanto., S.E., M.Akun (Dosen Pembimbing Magang).

Politeknik Negeri Jember sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi memiliki komitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga terampil dan siap menghadapi dunia kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang bersifat aplikatif dan kontekstual, salah satunya melalui pelaksanaan program magang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sebagai salah satu syarat kelulusan dan umumnya ditempuh pada awal semester VII. Pemilihan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali sebagai lokasi pelaksanaan magang didasarkan pada relevansi tugas dan fungsi instansi tersebut dengan mata kuliah yang telah dipelajari oleh mahasiswa, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Kegiatan magang akan dilaksanakan selama 700 jam kerja atau setara dengan empat bulan efektif, yaitu mulai tanggal 01 September 2025 s/d 31 Desember 2025 hal ini bertujuan untuk memfasilitasi teori dan praktik yang berkaitan dengan pelaksanaan digitalisasi belanja negara pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali salah satunya dengan implementasi *digital payment* yang diintegrasikan dengan sistem *marketplace*.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali membawahi KPPN Denpasar, KPPN Singaraja, dan KPPN Amlapura, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2008. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali melalui bidang SKKI sedang menggencarkan implementasi *digital payment* pada seluruh satuan kerja sebagai satu bentuk digitalisasi dalam hal belanja negara.

Prosedur implementasi *digital payment* dilaksanakan melalui tahapan manajemen user, manajemen pemesanan dan pengiriman, serta manajemen vendor. Realita implementasi *digital payment* hingga bulan November 2025 pada satuan kerja lingkup vertikal Kanwil DJPb Provinsi Bali menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini dapat dilihat melalui perbandingan antara capaian dan target yang sejauh ini memperoleh hasil yang maksimal. Capaian tersebut menggambarkan tingkat kesiapan dan komitmen satuan kerja untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran digital, sekaligus mencerminkan meningkatnya kualitas

layanan perbendaharaan di Provinsi Bali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar transaksi belanja operasional sudah terpusat dan terselenggara melalui sistem *digital payment*, sehingga mendukung tujuan transformasi digital yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.